



## Evaluasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kota Gorontalo

Cha Cha Esa Agustina Wuwungan<sup>1\*</sup>, Sri Yulianty Mozin<sup>2</sup>, Yacob Noho Nani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

<sup>2-3</sup>Program Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [wuwunganchacha@gmail.com](mailto:wuwunganchacha@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** High population growth demands sustainable family economic empowerment efforts, one of which is through the Acceptor Family Income Improvement Effort (UPPKA) Program. However, its implementation reality in Dulalowo Sub-district is characterized by the challenge of low community participation. This research aims to evaluate in-depth the extent of the program's success using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model approach. Through the application of a descriptive qualitative method, empirical data were collected from eight informants using in-depth interviews, observation, and documentation study techniques. The research findings indicate a contradictory gap between administrative success and economic welfare stagnation in the field. Contextually, this program is highly needed by the target community, but its implementation is hindered in the input aspect due to the absence of cash operational capital support. This directly impacts a passive socialization process and triggers low citizen participation due to sociological obstacles in the form of housewives' double burden. Consequently, the program's achievement product is only limited to fulfilling the kitchen needs of a small-scale group and fails to alleviate poverty at a macro level. In conclusion, this program requires a reorientation of assistance into cash capital, accurate integration of poverty data, and strengthening of cross-sectoral collaboration.

**Keywords:** CIPP Model; Economic Empowerment; Family Welfare; Policy Evaluation; UPPKA Program.

**Abstrak.** Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut adanya upaya penguatan ekonomi keluarga secara berkelanjutan, salah satunya melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Namun, realitas pelaksanaannya di Kelurahan Dulalowo diwarnai oleh tantangan berupa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam sejauh mana keberhasilan program tersebut dengan menggunakan pendekatan teori evaluasi model Context, Input, Process, Product (CIPP). Melalui penerapan metode kualitatif deskriptif, data empiris dikumpulkan dari delapan orang informan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang kontradiktif antara kesuksesan administratif dan stagnasi kesejahteraan ekonomi di lapangan. Secara konteks, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sasaran, tetapi pelaksanaannya terhambat pada aspek masukan akibat ketiadaan dukungan modal operasional tunai. Hal ini berdampak langsung pada proses sosialisasi yang pasif dan memicu rendahnya partisipasi warga akibat hambatan sosiologis berupa beban ganda ibu rumah tangga. Akibatnya, produk capaian program baru sebatas memenuhi kebutuhan dapur kelompok berskala kecil dan gagal mengentaskan kemiskinan secara makro. Kesimpulannya, program ini memerlukan reorientasi bantuan menjadi modal tunai, integrasi data kemiskinan yang akurat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan; Kesejahteraan Keluarga; Model CIPP; Pemberdayaan Ekonomi; Program UPPKA.

### 1. LATAR BELAKANG

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai sektor pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 284,4 juta jiwa dan terus menunjukkan tren peningkatan. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengendalian yang komprehensif berpotensi memicu berbagai persoalan sosial-ekonomi. Tekanan demografis ini berdampak luas pada pemenuhan kebutuhan di sektor pendidikan,

kesehatan, serta stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya membebani tingkat kesejahteraan masyarakat pada unit terkecil, yaitu keluarga (Sukrianto & Mahendra, 2023). Oleh karena itu, penguatan aspek ekonomi produktif berbasis keluarga menjadi instrumen yang krusial untuk mengantisipasi dinamika kependudukan dan mempercepat perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Merespons tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program Pembangunan Keluarga Berkualitas yang dilandasi secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Langkah strategis operasional diwujudkan melalui pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang diperkuat lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 serta Peraturan BKKBN RI Nomor 20 Tahun 2023 (Helma dkk., 2026). Kebijakan ini mengintegrasikan pembangunan lintas sektor yang tidak lagi sekadar berorientasi pada pembatasan kelahiran atau pelayanan kontrasepsi, melainkan mencakup penguatan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kemandirian ekonomi keluarga berbasis masyarakat (Yuliana dkk., 2022). Melalui pendekatan holistik ini, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap peluang peningkatan pendapatan ekonomi (Mawardi dkk., 2025). Sebagai program intervensi turunan konkret dalam ekosistem Kampung KB, dibentuklah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berfokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif bagi ibu rumah tangga atau wanita dari berbagai tingkatan kesejahteraan (Susianti, 2017).

Namun, pelaksanaan kebijakan publik berskala nasional ini sering kali menghadapi kesenjangan (gap) antara idealitas makro dengan realitas sosiologis di lapangan. Di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, teridentifikasi beban sasaran kesejahteraan yang besar, yakni mencapai 773 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori rentan secara makro Pra-Sejahtera hingga Sejahtera II) (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2024). Dari basis data tersebut, BKKBN mengerucutkan target spesifik pemberdayaan ekonomi UPPKA kepada 376 Pasangan Usia Subur (PUS) (BKKBN, 2026). Kendati target sarannya sangat potensial, hasil evaluasi menunjukkan realitas yang sangat berbeda dimana tingkat partisipasi masyarakat yang benar-benar aktif bergabung dalam program UPPKA di Kelurahan Dulalowo hanya menyentuh angka 1,77%. Rendahnya keanggotaan ini berimplikasi langsung pada kegagalan pencapaian target kemandirian ekonomi secara meluas, di mana program yang terbentuk baru sebatas satu kelompok yaitu "Kelompok UPPKA Inovasi" yang beranggotakan 10 orang (BKKBN, 2026).

Fenomena empiris di Kelurahan Dulalowo ini memunculkan hasil yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, program sukses secara administratif dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2025 serta berhasil menjadi wadah edukasi sosial mengenai kesehatan reproduksi. Namun di sisi lain, secara finansial-komersial, usaha produksi minyak kelapa kampung kelompok ini mengalami stagnasi, perputaran kas lambat karena pangsa pasar yang terbatas, sehingga manfaat ekonominya baru sebatas menekan pengeluaran dapur harian anggota dan belum mampu mengentaskan kemiskinan keluarga secara optimal.

Kondisi ini bertolak belakang dengan studi terdahulu oleh Anjeli & Ratnasari (2024) yang membuktikan kesuksesan implementasi UPPKA di Kelurahan Keranggan, Tangerang Selatan, di mana tingginya antusiasme partisipasi masyarakat mampu melipatgandakan pendapatan keluarga akseptor secara riil. Sementara itu, Sibarani dkk. (2023) dalam evaluasi UPPKA di Palembang menyatakan bahwa kegagalan proses pemberdayaan umumnya berakar dari kelemahan komponen input seperti minimnya anggaran dan SDM. Namun, di Kelurahan Dulalowo adanya kondidi yang terlihat bertentangan dimana dukungan fisik berupa fasilitas Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) telah disalurkan pemerintah, tetapi tingkat partisipasi tetap rendah akibat kendala sosiologis, keterbatasan alokasi modal operasional tunai kelompok, serta kecenderungan mentalitas masyarakat sasaran yang lebih menyukai bantuan sosial tunai instan daripada program pemberdayaan ekonomi. Isu rendahnya partisipasi akibat kurangnya pemahaman dan komitmen ini juga berkolaborasi dengan temuan Mardani dkk. (2024) di Tambaksari Surabaya, yang menegaskan masalah partisipasi sebagai hambatan kunci penciptaan keluarga sejahtera.

Kesenjangan antara kebijakan struktural dengan realitas sosiologis di lapangan memberikan justifikasi kuat mengenai pentingnya topik penelitian ini dipilih. Pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektoral, melainkan menuntut intervensi struktural lintas sektor yang nyata sejalan dengan Teori Strategi Pemberdayaan Suwondo (dalam Sudarmiani & Astuti, 2019). Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian evaluatif mendalam yang mampu membedah permasalahan dari hulu hingga ke hilir. Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (dalam Warman dkk., 2023) diterapkan sebagai kerangka pisau analisis dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif kriteria CIPP dinilai paling relevan karena secara komprehensif mengukur kesesuaian kebutuhan lapangan (*context*), kesiapan sarana prasarana (*input*), dinamika mekanisme sosialisasi dan pengawasan (*process*), hingga hasil capaian finansial maupun non-finansial yang saling bertolak belakang (*product*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kota Gorontalo, khususnya pada Kelompok UPPKA Inovasi di Kelurahan Dulalowo dengan menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Evaluasi Kebijakan Publik dan Model CIPP**

Secara konseptual, evaluasi kebijakan merupakan instrumen penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai kinerja suatu program serta memberikan umpan balik bagi perbaikan di masa depan (Igirisa, 2022). Dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan, penelitian ini berpijak pada Model Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini menguraikan evaluasi menjadi empat dimensi komprehensif, yakni Context (Konteks) untuk menilai relevansi sasaran dan kondisi lingkungan, Input (Masukan) untuk mengukur ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana, Process (Proses) guna memantau dinamika pelaksanaan dan hambatan teknis operasional, serta Product (Produk) untuk mengidentifikasi capaian dan dampak nyata dari pelaksanaan program tersebut (Warman dkk., 2023).

### **Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**

Program UPPKA adalah inisiatif strategis berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas finansial keluarga akseptor (terutama pada klasifikasi Pra-Sejahtera) melalui pengembangan usaha produktif, pemanfaatan waktu luang secara bernilai ekonomis, serta penguatan relasi keluarga demi terwujudnya kesejahteraan bersama (BKKBN, 2015). Kesiapan permodalan, baik yang bersumber dari swadaya anggota maupun intervensi stimulus pemerintah, merupakan unsur vital yang menentukan keberlanjutan produksi UPPKA di tingkat basis (Julita dkk., 2024).

### **Partisipasi Masyarakat dan Tindakan Rasional Instrumental**

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama penentu keberhasilan program pemberdayaan. Teori Tingkatan Partisipasi dari Sherry Arnstein dalam (Arbayah & Suparti, 2022) digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur sejauh mana masyarakat dilibatkan, mulai dari sekadar tahap pemberian informasi (informing) hingga tahap partisipasi kemitraan yang inklusif. Lebih lanjut, rendahnya keterlibatan warga sering kali dipengaruhi oleh mentalitas dan karakteristik sosiologis. Melalui kacamata Teori Tindakan Rasional

Instrumental dari Max Weber dalam (Erfan, 2020), tindakan masyarakat yang menolak program pemberdayaan UPPKA dan lebih menyukai bantuan sosial instan (seperti PKH/BLT) dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan rasionalitas pragmatis untung-rugi yang cepat demi mengamankan kebutuhan dapur harian.

### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu pemberdayaan masyarakat dan menjadi landasan komparatif dalam riset ini. Penelitian Anjeli & Ratnasari (2024) menemukan bahwa implementasi UPPKA di Tangerang Selatan sukses mendongkrak pendapatan berkat partisipasi aktif dari ibu rumah tangga, sebuah kondisi ideal yang sangat kontras dengan stagnasi di daerah lain. Sementara itu, penelitian Mardani dkk. (2024) di Surabaya dan Sibarani dkk. (2023) di Palembang yang menggunakan model CIPP, menyimpulkan bahwa kegagalan pemberdayaan dan rendahnya partisipasi berakar dari minimnya sosialisasi, keterbatasan anggaran/input finansial, serta pemahaman sasaran yang rendah terhadap program.

Kajian dari Igrisa dkk. (2022) turut mempertegas bahwa efektivitas tata kelola program birokrasi di tingkat daerah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pelaksana dan kualitas pembinaan. Selain itu, riset Febriyanti dkk. (2023) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan struktural lintas sektor antar-dinas dalam menyukseskan UPPKA sebagai jaring pengaman pengentasan kemiskinan makro.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menonjolkan perspektif subjek dan makna dari fenomena di lapangan secara mendalam (Harahap, 2020). Desain evaluasi dioperasionalkan melalui model CIPP (Context, Input, Process, Product) berdasarkan konsep Abubakar (2021), yang menggabungkan evaluasi formatif untuk menilai jalannya Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), serta evaluasi sumatif untuk mengukur hasil nyatanya. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Dulalowo, Kota Gorontalo dengan fokus pengamatan pada Kelompok UPPKA Inovasi. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui lima tahapan: perencanaan objek, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penilaian keberhasilan program, hingga penarikan kesimpulan.

Untuk memastikan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling (Lenaini, 2021). Data primer diperoleh dari 8 orang informan yang terdiri dari unsur birokrasi (Lurah dan Penyuluh KB),

pengurus dan anggota kelompok, serta masyarakat sasaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan triangulasi. Selanjutnya, data dianalisis secara simultan menggunakan Model Analisis Berulang dari Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diverifikasi melalui uji kredibilitas (triangulasi sumber dan teknik), transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Susanto & Jailani, 2023).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis mendalam menggunakan kerangka model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (dalam Warman dkk., 2023), implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) pada Kelompok Inovasi di Kelurahan Dulalowo menunjukkan dinamika yang kompleks. Penilaian ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan struktural dengan realitas sosiologis masyarakat di lapangan.

##### ***Evaluasi Konteks (Context)***

Evaluasi konteks bertujuan untuk mengukur tingkat kebutuhan (*needs assessment*) masyarakat terhadap program. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kehadiran UPPKA di Kelurahan Dulalowo sangat krusial dan mendesak. Berdasarkan data basis kesejahteraan, wilayah ini menanggung beban sasaran keluarga kurang mampu terbesar di Kecamatan Kota Tengah, yakni mencapai 773 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori Pra-Sejahtera hingga Sejahtera II. Selain itu, terdapat potensi demografis berupa 376 Pasangan Usia Subur (PUS) yang sangat membutuhkan intervensi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan untuk menopang ketahanan keluarga. Kondisi ekonomi ini dipertegas oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh melalui pihak Pemerintah Kelurahan Dulalowo (2026), yang mencatat bahwa terdapat 239 KK berada pada kategori termiskin (Desil 1–4) di wilayah tersebut. Data ini membuktikan bahwa secara konteks lingkungan, Kelurahan Dulalowo adalah lokus yang sangat tepat dan membutuhkan program UPPKA sebagai wadah pengentasan kemiskinan.

##### ***Evaluasi Masukan (Input)***

Pada dimensi masukan, temuan menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya. Dari segi fasilitas, Kelompok UPPKA Inovasi telah mendapatkan intervensi fisik yang sangat memadai berupa seperangkat Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) dari BKKBN Provinsi. Dari

segi Sumber Daya Manusia (SDM), kader terbukti mahir mengolah limbah ampas kelapa lokal menjadi minyak goreng kampung.

Namun, kesiapan input ini memiliki celah kelemahan yang fatal ketiadaan modal operasional berwujud uang tunai. Pemerintah kelurahan belum mampu mengalokasikan bantuan dana harian, sehingga operasional murni mengandalkan swadaya mandiri anggota yang sangat terbatas. Selain itu, kelompok belum difasilitasi dengan gedung sekretariat tetap (masih menumpang di rumah pribadi Ketua Kelompok, Ibu Fatmawati Moosisi), serta masih lemahnya kapasitas manajerial pengurus dalam hal pembukuan keuangan dan manajemen pemasaran produk.

### ***Evaluasi Proses (Process)***

Tahapan proses mengevaluasi bagaimana dinamika program dijalankan secara nyata. Di sinilah ditemukan hambatan terbesar pelaksanaan program. Kendati didukung dengan urgensi kemiskinan yang tinggi dan fasilitas alat masak yang lengkap, partisipasi masyarakat justru berada pada titik yang sangat memprihatinkan.

**Tabel 1.** Perbandingan Partisipasi Program UPPKA di Kelurahan Dulalowo (2026).

<b>Indikator Partisipasi</b>	<b>Total PUS</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Persentase</b>
Data Sekunder (Portal Digital Kampung KB)	376	6 - 7 Orang	1,77%
Data Primer (Temuan Aktual Lapangan)	376	10 Orang	2,66%

*Sumber: Data Olahan Peneliti (2026).*

Berdasarkan Tabel 1, tingkat partisipasi masyarakat akseptor di dalam sistem digital hanya tercatat 1,77%. Sekalipun dilakukan verifikasi aktual di lapangan yang menunjukkan adanya 10 anggota aktif (2,66%), angka tersebut tetap membuktikan fakta linear bahwa keterlibatan masyarakat berada pada kategori sangat minim (di bawah 5%).

Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh pola sosialisasi yang belum merata. Mengacu pada Teori Tingkatan Partisipasi Sherry Arnstein (dalam Arbayah & Suparti, 2022), tahapan sosialisasi di Dulalowo belum mampu menembus tangga ketiga, yakni tahap pemberian informasi sempurna (informing). Masyarakat tidak dilibatkan secara inklusif. Selain itu, ditemukan hambatan sosiologis yang kuat: para ibu rumah tangga mengalami "beban ganda" (double burden) karena harus mengurus anak/balita sehingga kesulitan meluangkan waktu untuk memproduksi minyak kelapa. Mentalitas warga sasaran juga cenderung lebih pragmatis dan rasional, di mana mereka lebih memilih menunggu Bantuan Sosial tunai instan (seperti PKH) ketimbang harus bersusah payah merintis usaha dari nol bersama kelompok UPPKA.

### **Evaluasi Produk (Product)**

Dimensi produk menilai capaian atau hasil nyata dari program. Hasil evaluasi menemukan adanya hasil yang saling bertolak belakang. Secara administratif, program ini dinyatakan sukses besar. Kelompok UPPKA Inovasi berhasil melegalkan statusnya diakui oleh negara dengan mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2025.

Namun, secara kesejahteraan ekonomi, program ini mengalami stagnasi. Karena keterbatasan modal dan minimnya anggota yang memproduksi minyak kelapa, perputaran kas menjadi lambat dan skala komersialnya sangat kecil. Produk minyak kampung yang dihasilkan baru sebatas berfungsi untuk menekan pengeluaran belanja dapur harian bagi ke-10 anggota aktifnya, dan belum mampu bergerak masif untuk mengentaskan 773 keluarga miskin di kelurahan tersebut secara optimal.

### **Pembahasan**

Evaluasi kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) pada Kelompok Inovasi di Kelurahan Dulalowo dianalisis menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Daniel Stufflebeam (dalam Warman dkk., 2023). Pembahasan ini menyoroti bagaimana realitas pelaksanaan program di tingkat basis berbenturan dengan teori kebijakan, serta perbandingannya dengan studi terdahulu untuk menemukan implikasi strategis bagi pengentasan kemiskinan.

### **Kesenjangan Konteks (Context) dan Ketepatan Sasaran**

Hasil evaluasi pada dimensi konteks membuktikan bahwa keberadaan program UPPKA di Kelurahan Dulalowo sangat relevan dengan tingginya urgensi kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, terdapat kesenjangan (gap) yang sangat besar antara tujuan program dengan realitas partisipasi yang hanya mencapai 1,77%. Kesenjangan ini dipicu oleh ketidaksinkronan data program UPPKA belum terintegrasi secara utuh dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang mencatat 239 Kepala Keluarga (KK) termiskin (Desil 1–4) di wilayah tersebut. Akibatnya, kelompok rentan luput dari intervensi pemberdayaan dan tetap bergantung pada bantuan sosial pasif.

Temuan ini secara teoretis mengonfirmasi kajian Sulila (2020) mengenai implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat basis. Sulila menegaskan bahwa implementasi dana pemberdayaan tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin jika tidak didukung oleh ketepatan pemetaan sasaran. Lebih lanjut, temuan ini memperluas perspektif penelitian Febriyanti dkk. (2023). Jika Febriyanti memandang UPPKA murni sebagai alat pengentas kemiskinan berskala makro, penelitian ini justru membuktikan bahwa UPPKA di Dulalowo baru mampu bertindak sebagai "wadah survivalitas mandiri" berbasis

pengolahan limbah (ampas kelapa) yang fungsinya lebih pada mempertahankan motivasi sosial akseptor KB agar tidak drop-out (putus ber-KB) akibat kendala biaya dapur.

### ***Keterbatasan Masukan (Input) dan Perilaku Birokrasi***

Pada dimensi masukan, BKKBN telah mengalokasikan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) yang memadai. Namun, operasional kelompok terhambat secara fatal akibat ketiadaan alokasi modal uang tunai harian dan ketiadaan gedung sekretariat. Kondisi ini memaksa kelompok menjalankan usaha murni secara swadaya yang rentan terhenti.

Kelemahan pada kesiapan input ini sejalan dengan analisis Sibarani dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa kegagalan pemberdayaan berakar dari minimnya permodalan. Secara lebih spesifik, hambatan operasional ini memperkuat postulat Mozin & Isa (2023) mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan. Mozin menyimpulkan bahwa pelayanan publik dan implementasi program di tingkat basis sering kali berjalan lambat dan kurang optimal akibat tidak selarasnya program dengan pengoptimalan kemampuan sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana pendukung dan aplikasi sistem manajemen di tingkat desa.

Selain itu, ketiadaan modal ini berbenturan langsung dengan mentalitas masyarakat yang dianalisis menggunakan Teori Tindakan Rasional Instrumental dari Max Weber (Erfan, 2020). Masyarakat cenderung bertindak pragmatis berdasarkan pertimbangan untung-rugi yang cepat; mereka lebih memilih menunggu Bantuan Sosial (PKH/BLT) yang hasilnya instan, daripada berpartisipasi dalam program pemberdayaan UPPKA yang prosesnya panjang dan belum menjamin keuntungan ekonomi harian akibat ketiadaan *modal*.

### ***Sentralisasi Proses (Process) dan Hambatan Sosiologis***

Evaluasi proses menunjukkan bahwa pembinaan administrasi oleh pemerintah berjalan pasif dan belum menyentuh aspek manajemen pembukuan keuangan secara resmi. Hal ini relevan dengan kajian Igirisa dkk. (2022) yang menekankan bahwa optimalisasi tata kelola organisasi sangat ditentukan oleh kepatuhan pelaksana dan kemampuan meminimalisasi kesalahan pencatatan transaksi agar pelaporan keuangan berjalan efektif.

Lebih jauh, angka partisipasi yang stagnan (1,77%) berakar dari sentralisasi sosialisasi yang hanya berpusat pada pertemuan rutin Balai KB. Menggunakan Teori Tingkatan Partisipasi Sherry Arnstein (dalam Arbayah & Suparti, 2022), proses ini terbukti belum menembus tahap Pemberian Informasi (Informing) secara inklusif kepada masyarakat luar (Mardani dkk., 2024).

Di luar masalah komunikasi, penelitian ini mengungkap temuan sosiologis krusial sebagai anomali lapangan: penolakan masyarakat sasaran dipicu oleh tingginya beban domestik ganda (double burden). Ibu rumah tangga Pasangan Usia Subur (PUS) merasa

kesulitan membagi waktu antara mengurus anak balita dengan proses pembuatan minyak kelapa yang memakan waktu lama, apalagi sistem bagi hasil program menerapkan prinsip ketat ("siapa kerja fisik, dia dapat hasil").

### ***Stagnasi Produk (Product) dan Urgensi Kolaborasi Lintas Sektor***

Pada tahap akhir, evaluasi produk menunjukkan capaian yang saling bertolak belakang. Secara administratif, program ini dinyatakan sukses melegalkan status usaha dengan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada 2025 serta berhasil menjadi wadah edukasi sosial. Namun secara komersial, program ini mengalami stagnasi finansial. Produk minyak kelapa baru mampu menekan pengeluaran dapur harian 10 anggota aktif, dan gagal menciptakan keuntungan makro untuk mengentaskan ratusan keluarga miskin lainnya.

Capaian ini sangat kontras dengan kesuksesan UPPKA di Keranggan (Anjeli & Ratnasari, 2024) yang mampu melipatgandakan pendapatan masyarakat secara riil karena didukung partisipasi warga yang tinggi. Kegagalan produk komersial di Dulalowo ini mempertegas rumusan teori Strategi Pemberdayaan dari Suwondo (dalam Sudarmiani & Astuti, 2019) bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa diselesaikan melalui intervensi sektoral semata, melainkan menuntut intervensi struktural lintas sektor.

Kegagalan membangun sinergi komprehensif ini tercermin dari kurangnya integrasi antara BKKBN dengan Dinas Koperasi/UMKM dan Dinas Sosial dalam penyediaan modal pasar. Fakta ini secara teoretis mengonfirmasi penelitian Nani dkk. (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan perilaku organisasi dalam memperluas kerja sama kelembagaan dan melibatkan pemangku kepentingan secara maksimal. Karena pelaksana UPPKA cenderung terisolasi dalam ego-sektoral, keluaran produk (product) menjadi sangat terbatas.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Evaluasi CIPP menunjukkan implementasi Program UPPKA Kelompok Inovasi di Kelurahan Dulalowo mengalami kontradiksi antara kesuksesan administratif dan stagnasi ekonomi. Secara *context*, program ini sangat mendesak bagi 773 KK kurang mampu dan 376 PUS, walau belum sinkron dengan data DTKS (Desil 1–4). Pada aspek *input*, fasilitas Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) dan keterampilan kader menjadi tidak optimal akibat ketiadaan modal tunai, sekretariat tetap, dan kelemahan manajemen keuangan. Keterbatasan ini berdampak pada *process*, di mana sosialisasi pasif memicu rendahnya partisipasi masyarakat, yaitu hanya 1,77% secara digital dan 2,66% secara aktual. Minimnya keterlibatan tersebut dipicu beban domestik ganda (double burden) ibu rumah tangga dan preferensi warga terhadap

bantuan sosial tunai instan. Alhasil pada dimensi *product*, kelompok sukses secara legalitas dengan kepemilikan NIB sejak 2025, namun stagnan secara komersial makro karena produksi minyak kelapa baru memenuhi kebutuhan dapur 10 anggota aktif serta belum mampu mengentaskan kemiskinan akibat kuatnya ego sektoral instansi pembina.

Untuk optimalisasi program ke depan, BKKBN Provinsi dan Pemerintah Kelurahan perlu mengalihkan bantuan fisik (ATTG) menjadi stimulan modal tunai harian demi menjamin keberlanjutan produksi. Pengelola Kampung KB juga harus menyinkronkan data sasaran dengan DTKS Kemensos (Desil 1–4) agar intervensi tepat sasaran. Ego sektoral antarlembaga perlu diatasi melalui kemitraan formal dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk pembinaan manajemen serta pemasaran digital, sekaligus menggandeng Dinas Sosial untuk perluasan jaringan pasar. Secara internal, Kelompok UPPKA Inovasi harus merumuskan jadwal kerja dan sistem bagi hasil yang lebih adaptif terhadap beban domestik ganda ibu rumah tangga PUS.

Penelitian ini terbatas pada satu kelompok usaha spesifik di tingkat kelurahan dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara makro untuk seluruh wilayah Kota Gorontalo. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) dengan cakupan wilayah lebih luas guna menyajikan analisis komparatif serta pengukuran dampak ekonomi program pemberdayaan secara lebih terukur dan komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). CV. Syakir Media Pers.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Anjeli, P., & Ratnasari, W. P. (2024). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Ranca Bulan di Kelurahan Kerangan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kommunity Online*, 5(1), 15–32. <https://doi.org/10.15408/jko.v5i1.38947>
- Arbayah, S., & Suparti, H. (2022). Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.516>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah penduduk pertengahan tahun - tabel statistik. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- BKKBN. (2015). *8 Langkah Tingkatkan Penghasilan Keluarga*. <https://yosakurga.com/d-materi/4d513d3d/8-langkah-tingkatkan-penghasilan-keluarga>

- BKKBN. (2026). Dulalowo. Portal Kampung KB BKKBN. <https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/3564/dulalowo>
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. (2024). Data perkembangan kesejahteraan keluarga (1). Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2024/data-integrasi/6/data-perkembangan-kesejahteraan-keluarga>
- Erfan, M. (2020). Spirit filantropi Islam dalam tindakan sosial rasionalitas nilai Max Weber. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 54–64. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.281>
- Febriyanti, N. L. A., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengentas kemiskinan melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kota Surabaya. *Pengamat PRAJA: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 162–172. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1070>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif* (H. Sazali, Ed.; 1st ed.). Wal ashri Publishing.
- Helma, Syabani Arlan, A., & Jumadi. (2026). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam pemberdayaan perempuan di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, (4), 1490–1501.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Tanah Air Beta. [www.tabgrafika.com](http://www.tabgrafika.com)
- Igirisa, I., Sartika, D., Ilato, R., & Kamuli, S. (2022). Implementation of local management information system (SIMDA) in quality improvement of financial report of Buol Regencial Government. *British Journal of Philosophy, Sociology and History*, 2(1), 35–39. <https://doi.org/10.32996/bjps.2022.2.1.6>
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. (2022).
- Julita, R., Oktasari, O., Capriyanti, O., Eko Setiawan, D., Studi Perbankan Syariah, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama, S. (2024). Peran UPPKA BKKBN Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kampung KB Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu). *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2). <https://doi.org/10.29040/JIE.V8I2.13670>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Mardani, V. E., Indartuti, E., & Rahmadanik, D. (2024). Penerapan prinsip good governance dalam program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) sebagai upaya menciptakan keluarga yang sejahtera di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(8), 239–246. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Mawardi, I., Nursetiawan, I., & Arifin, F. S. (2025). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. *Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(6), 758–770. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/6298/5486>

- Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75>
- Nani, Y. N., Tohopi, R., Tui, F. P., & Abdussamad, J. (2022). The role of bureaucratic behavior on increasing the effectiveness of educational policies: Perspective of Robbin's theory development. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 236–255. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5570>
- Sibarani, Y. E., Mudasir, & Sakir, I. M. (2023). Evaluasi pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor di Kampung Keluarga Berkualitas Tanjung Rawo dan Layang-Layang Kota Palembang. @-Publik: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 80–62. <https://ejournal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiPublik/article/view/361/203>
- Sudarmiani, & Astuti, W. (2019). Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun). *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v7i2.4777>
- Sukrianto, A., & Mahendra, G. K. (2023). Partisipasi masyarakat dalam program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4). <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.486>
- Sulila, I. (2020). Village fund policy implementation model in efforts to reduce poverty rate. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 36(2), 440–449.
- Susanto, D., & Jailani, M. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Susianti. (2017). Efektivitas Program UPPKS sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi: Studi kasus Kelurahan Srimartani, Piyungan, Bantul. *Journal of Business Administration*, 1(2), 280–295.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2009).
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Yuliana, Permana, I., & Hidayat, M. T. (2022). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Studi kasus pada Kampung Keluarga Berkualitas Kunir Sejahtera di Desa Kedung jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon). *Journal Syntax Literate*, 7(1), 2543–2575.